Mustika Ratu Center 1st Floor Room 101
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Phone/fax :+62 21 8379 2359 | e-mail : contact@cita.or.id | www.cita.or.id

Center for Indonesia Taxation Analysis

Siaran Pers

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Perpajakan

1th Jokowi-Jk

Mustika Ratu Center 1st Floor Room 101
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Phone/fax :+62 21 8379 2359 | e-mail : contact@cita.or.id | www.cita.or.id

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Bidang Perpajakan

Yustinus Prastowo
yustinus.prastowo@cita.or.id
jpras07@gmail.com
http://www.cita.or.id

Hari ini genap satu tahun Jokowi dan JK memerintah. Beberapa pencapaian layak diapresiasi meski belum memuaskan. Trisakti dan Nawacita adalah platform visi yang dapat dijadikan rujukan untuk menilai apakah kebijakan Pemerintah sesuai dengan visi atau justru melenceng.

Di bidang Perpajakan, kami memberikan penilaian dan catatan sebagai berikut.

1. Nawacita merupakan visi yang memuat platform reformasi kebijakan perpajakan menyeluruh karena menyentuh dimensi regulasi, kelembagaan, dan administrasi. Kekuatan Nawacita adalah menempatkan pajak sebagai instrumen fiskal yang terukur dan efektif dalam bingkai kesadaran ideologis bahwa politik anggaran perlu ditata ulang.

2. Janji penting Nawacita adalah transformasi kelembagaan, yaitu membentuk Badan Penerimaan Negara yang lebih otonom, kredibel dan profesional, target tax ratio 16% pada 2019, dan desain ulang arsitektur fiskal yaitu rekoneksi belanja-penerimaan agar lebih bermanfaat bagi rakyat.

3. Pemerintahan Jokowi-JK memulai tahun pertama pemerintahannya dengan meningkatkan target penerimaan pajak yang sangat tinggi tanpa mengukur kapasitas pemungutan. Tekanan target ini berakibat pada aktivitas pemungutan pajak yang instan dan agresif sehingga berpotensi mendistorsi hak-hak wajib pajak.

4. Jokowi-JK melalui Perpres 37/2015 juga telah menaikkan remunerasi pegawai pajak sangat signifikan. Hal ini adalah prasyarat bagi kinerja pemungutan yg lebih optimal. Namun skema dan struktur remunerasi perlu ditinjau ulang, baik dari sisi keadilan maupun efektivitasnya.

5. Pemerintah juga memulai tahun pertama dengan pergantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai melalui seleksi terbuka. Meski masih terdapat beberapa kelemahan, proses ini cukup bagus sebagai pondasi tata kelembagaan ke depan dan diharapkan pimpinan lembaga lebih bertanggung jawab, akseptabel dan kompeten.

6. Kenaikan target penerimaan pajak belum diikuti pemahaman yang baik akan pentingnya reformasi perpajakan yang komprehensif sehingga kebijakan perpajakan msh bertumpu pada intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa arah yang jelas, belum mengarah pd sektor potensial, menyasar kelompok tdk patuh, dan dilandasi upaya membangun kepatuhan sukarela wajib pajak.

7. Di sisi lain, Tahun Pembinaan Wajib Pajak merupakan program yang cukup bagus sebagai upaya membangun kesadaran dan kepatuhan pajak, meski dlm praktik mengalami berbagai kendala, termasuk distorsi pemerintah sendiri dg mewacanakan Tax Amnesty.

8. Sensitivitas Pemerintah akan pentingnya aspek pajak sebagai insentif mulai muncul ketika pd Semester II mulai terjadi perubahan orientasi kebijakan pajak yg mendukung pemulihan ekonomi. Strategi pemungutan pajak yang lebih longgar akan memberi rasa nyaman bagi

Mustika Ratu Center 1st Floor Room 101
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Phone/fax :+62 21 8379 2359 | e-mail : contact@cita.or.id | www.cita.or.id

masyarakat, di sisi lain target sebaiknya lebih realistis dan tidak dijadikan ukuran satu-satunya kinerja Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Berdasarkan hal tersebut kami mendesak:

1. Jokowi-JK konsisten dengan visi Nawacita sehingga kebijakan pajak akan mendukung fiscal sustainability bagi pencapaian kesejahteraan rakyat.

2. Melakukan reformasi kelembagaan yaitu segera mewujudkan Badan Penerimaan Negara yg kredibel, otonom, dan profesional, rekoneksi belanja dengan penerimaan, menyusun strategi jangka menengah yang berkelanjutan, dan membuat Forum Koordinasi Penegak Hukum.

3. Mempercepat proses revisi UU Perpajakan dengan tetap memperhatikan prinsip dan asas perpajakan yang berkeadilan, menciptakan kepastian hukum, efisien, dan melindungi hak-hak wajib pajak.

4. Menempatkan target perpajakan dalam bingkai reformasi fiskal dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, alokasi tax expenditure (insentif), dan kebutuhan belanja riil Pemerintah, termasuk pelibatan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

5. Jokowi-JK menunda pemberlakuan pengampunan pajak sampai beberapa prasyarat utama disiapkan: administrasi pasca-pengampunan, skema manajemen kepatuhan pajak, revisi UU Perbankan, inisiasi Single Identification Number (SIN).

6. Menteri Keuangan dan jajarannya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk tidak sekedar menjadikan wajib pajak dan komunitas perpajakan sebagai objek kebijakan tetapi sebagai subjek yang memiliki hak dan tanggung jawab setara dalam pembangunan.

7. Kemenkeu, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai menjamin konsistensi kebijakan perpajakan yg mengedepankan pembinaan, pelayanan, bimbingan dan prioritas penyelesaian administrasi yang objektif dan adil, pemenuhan hak wajib pajak sesuai UU. Di sisi lain berani melakukan penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap pengemplang pajak.

8. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan aturan yang berlaku agar menciptakan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan yang penting bagi kepatuhan sukarela.

9. Publik terus-menerus melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK, agar Pemerintahan demokratis yang dipilih rakyat ini setia dan tidak melenceng dari visi Trisakti dan janji Nawacita.

Jakarta, 20 Oktober 2015
Salam hormat

Yustinus Prastowo
Direktur Eksekutif

Mustika Ratu Center 1st Floor Room 101
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.74-75, Pancoran, Jakarta Selatan 12870
Phone/fax :+62 21 8379 2359 | e-mail : contact@cita.or.id | www.cita.or.id

Biografi Penulis

Yustinus Prastowo, SE, MA, M.Hum

- Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) Jakarta
- Peneliti Kebijakan Perpajakan pada Perkumpulan Prakarsa
- Alumnus Pascasarjana STF Driyarkara Jakarta

Email :
yustinus.prastowo@cita.or.id
jpras07@gmail.com